



RENCANA STRATEGIS

2025 – 2026



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yakni mempertimbangkan menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ialah adanya kekosongan jabatan kepala daerah.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Inmendagri 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah daerah, sehingga daerah yang periode RPJMD-nya telah berakhir dapat merencanakan pembangunan untuk tahun 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini sesuai RPD tersebut diatas. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perencanaan taktis strategis sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah strategis ini dilakukan dengan melakukan proses transformasi dari suatu proses perencanaan strategis melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan praktis sesuai kaidah perencanaan.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan penutup

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026 ini. Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan serta niat yang tulus dari usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera, mendapatkan imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Probolinggo, Desember 2023
**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Organisasi Dinas	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	38
3.2 Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB IV PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan Urusan Sosial
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial (APBN dan APBD)
Tabel 2.5	Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)
Tabel 2.6	Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).
Tabel 2.8	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2022.
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Serta Realisasinya Tahun 2022
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Tabel 4.1	Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2025 -2026
Tabel 4.2	Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2025-2026
Tabel 4.3	Cascading Misi II ILevel 1
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Tabel T-C.26.)
Tabel 6.1	(T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan sebuah perancangan untuk periode 5 tahun yang mencakup berbagai elemen seperti tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen Renstra disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, mengikuti pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan bersifat indikatif.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memenuhi harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan yang lebih baik merupakan fokus utama. Koordinasi dan integrasi menjadi penting dengan peningkatan koordinasi antarbagian di dalam organisasi dan integrasi berbagai aspek tugas serta fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis ini juga menjadi panduan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga menjadi fokus, sementara dasar untuk pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian tujuan diberikan untuk memonitor dan mengevaluasi progres secara berkala. Melalui pemahaman terhadap latar belakang ini, perencanaan strategis perangkat daerah diharapkan dapat membantu organisasi mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai keunggulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Dinas Sosial PPPA) ini disusun dari adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Maka daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Disamping itu dengan telah diterbitkannya Instruksi Mendagri 3 tahun 2023 yang pada intinya menghadapi masa transisi bertujuan menyiapkan Dokumen Pembangunan Daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota tahun 2024-2026 dimana nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. maka serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, Dinas sosial PPPA memperhatikan:

- 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2026;
- 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- 3) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 4) Kebijakan nasional; dan
- 5) Regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan panduan bagi aparaturnya Dinas Sosial PPPA dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan peran serta perempuan dan masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Probolinggo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Menengah Berakhir Pada Tahun 2024
 25. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
 30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
36. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
37. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
39. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo periode 2025 - 2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu dua tahun (2025 - 2026) dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah: Menetapkan dokumen yang memuat jabaran arahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 kedalam rencana instansional sekaligus menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo secara teknis disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan uraian tentang gambaran secara umum tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur organisasi) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah termasuk capaian SPM
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penjabaran visi misi serta program walikota dan wakil walikota terpilih, penelaahan renstra, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bagian ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2 (Tahun) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan strategi serta arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo untuk mendukung pembangunan daerah dalam 2 (dua) tahun kedepan.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dua tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada rentang waktu 2025 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi gambaran singkat, kesimpulan dan harapan yang ingin dicapai dalam penulisan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

2.1 TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi umum Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. melaksanakan administrasi umum Dinas;
 - c. melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - d. melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
 - e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
 - f. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- b. pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

- c. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- d. pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- e. pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal.
- h. pelaksanaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri, meliputi Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- c. pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
- e. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
 - e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
 - f. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
 - g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :
- a) pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
 - b) pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan;
 - c) pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 - d) pelaksanaan pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan;
 - e) pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - f) pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 - g) pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
 - h) pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
 - i) pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

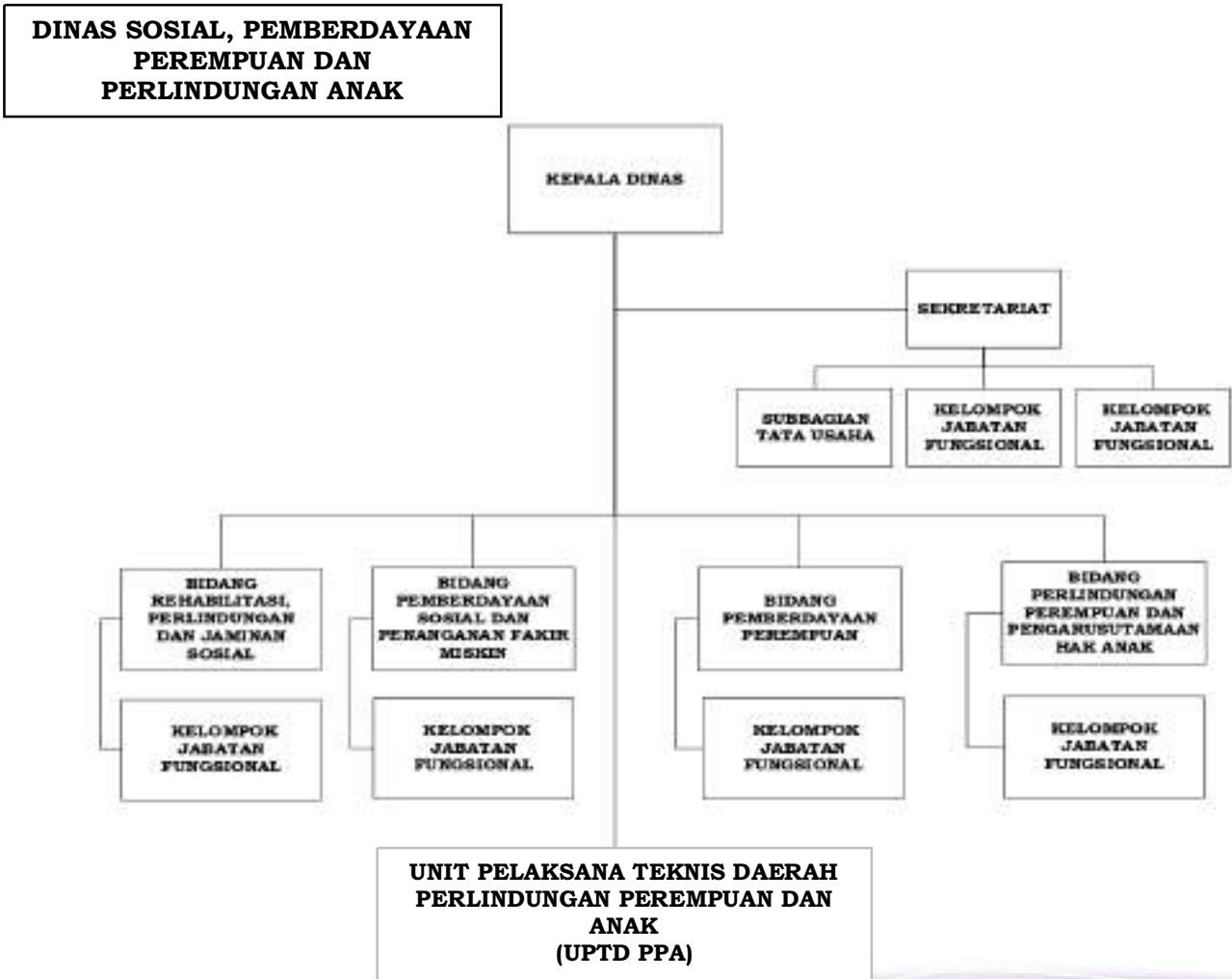
UPTD merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus masalah lainnya.

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA mempunyai fungsi :

- a) Penyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksana kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b) Pelaksana program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
 - 1. Pengaduan masyarakat;
 - 2. Penjangkauan korban;
 - 3. Pengelolaan kasus;
 - 4. Penampungan sementara;
 - 5. Mediasi;
 - 6. Pendampingan korban.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.



2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI DINAS

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada 1 Desember tahun 2023 seluruhnya sebanyak 60 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	39	64 %
2	TENAGA KONTRAK	1	2 %
3	PPPK	2	3 %
4	PTT	18	31 %
	JUMLAH	60	100 %

Pegawai yang menangani urusan Sosial

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	30	65 %
2	TENAGA KONTRAK	1	2 %
3	PPPK	1	2 %
4	PTT	13	30 %
	JUMLAH	45	100 %

Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	JENIS	JUMLAH	PERSENTASE
1	PNS	9	60 %
2	TENAGA KONTRAK	0	0 %
3	PPPK	1	7 %
4	PTT	5	33 %
	JUMLAH	15	100 %

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan

Urusan Sosial

NO.	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Sekretariat				
	-	Kepala Dinas	1	-	1
	-	Sekretaris	-	1	1
	-	Tenaga Fungsional	-	2	2
	-	Sub bagian Tata Usaha	-	1	1
	-	Rumpun Jabatan Pelaksana	3	2	5
2	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	-	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	1
	-	Tenaga Fungsional	-	5	5
	-	Rumpun Jabatan Pelaksana	4	1	5
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin				
	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	-	1
	-	Jabatan Fungsional	2	3	5
	-	Jabatan Pelaksana	3	-	3

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS		JUMLAH
		KELAMIN		
		L	P	
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	-	1	1
	- Jabatan Fungsional	-	1	1
	- Jabatan Pelaksana		2	2
2	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak			
	- Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak		1	1
	- Jabatan Fungsional	1	-	1
	- Jabatan Pelaksana	1	-	1

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS		JUMLAH
		KELAMIN		
		L	P	
1	UPTD			
	- Kepala UPTD		1	1
	- Jabatan Fungsional	-	-	-
	- Jabatan Pelaksana		1	1

1.2.2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Gedung	Alamat/Lokasi	Jumlah
1	Gedung Kantor Dinas Sosial PPPA	Jl. Dringu 13	1
2	Shelter	Jl. Mastrip	1
3	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Jl. Basuki Rahmat	1
4	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jl. Slamet Riyadi	1
5	Kantor Bersama TAGANA dan TKSK, PSM, LK3	Jl. Panglima Sudirman	1

1.2.3. Sumberdaya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dengan sumber dana Sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial (APBN dan APBD)

No	TAHUN	JUMLAH			
		APBD	DBH-CHT	APBD PROV	APBN
1	2019	10,702,349,741	800,374,000	0	18.830.025.000
2	2020	7,557,565,929	0	0	28.425.735.000
3	2021	6.156.743.445	300.474.000	50.000.000	23.991.000.000
4	2022	8.318.472.649	450.655.800	93.600.000	25.572.700.000
5	2023	6.834.404.875	7.914.308.700	93.600.000	24.128.808.337

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 2.5
Anggaran pembangunan P3A (APBN dan APBD)

JUMLAH					
No	TAHUN	APBD	DBHCHT	APBD PROV	APBN
1	2019	6.651.288.231	0	0	0
2	2020	320.293.985	0	0	0
3	2021	351.709.000	0	0	0
4	2022	1.315.714.900	0	0	0
5	2023	1.097.285.880	0	0	0

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Sosial diukur berdasarkan efektivitas dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA mencakup berbagai aspek dalam upaya menyediakan bantuan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Berikut adalah gambaran umum kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA:

1. Identifikasi Kebutuhan:
Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, terutama yang berada dalam situasi rentan atau membutuhkan dukungan sosial.
2. Pendataan dan Pemetaan:
Melakukan pendataan dan pemetaan untuk mengetahui jumlah dan distribusi populasi yang memerlukan layanan sosial.
3. Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial:
Merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program bantuan sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, atau program keamanan sosial.
4. Penanganan Krisis dan Keadaan Darurat:
Memberikan bantuan dan dukungan saat terjadi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau situasi konflik sosial.
5. Pemberdayaan Masyarakat:
Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mandiri dan kemandirian individu atau kelompok.
6. Penyuluhan dan Edukasi:
Memberikan informasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak sosial, layanan yang tersedia, dan cara mengakses bantuan.

7. **Penanganan Anak dan Keluarga:**
Menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau keluarga yang memerlukan perlindungan dan dukungan khusus.
8. **Rehabilitasi Sosial:**
Menyediakan program rehabilitasi sosial untuk individu yang mengalami masalah kecanduan atau rehabilitasi sosial lainnya.
9. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**
Bekerja sama dengan organisasi nirlaba, lembaga pemerintah lainnya, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan.
10. **Monitoring dan Evaluasi:**
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif.
11. **Penyediaan Layanan Konseling:**
Menyediakan layanan konseling sosial untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah emosional, psikologis, atau sosial.
12. **Advokasi dan Pemajuan Kebijakan Sosial:**
Terlibat dalam advokasi untuk memajukan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan suara kepada kelompok yang rentan. Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD:

2.3.1 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial kota Probolinggo mengampu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial; dan
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pemberdayaan masyarakat dan Desa

Berdasarkan UU 23 tahun 2016; Dalam pembagian urusan pemerintah bidang sosial:

- A. Sub bidang pemberdayaan sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Pemberdayaan Sosial KAT
 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota

- B. Sub bidang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan.
- C. Sub bidang Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
- D. Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1. Pemeliharaan Anak-anak terlantar.
 - 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota
- E. Penanganan Bencana
 - 1. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
- F. Taman Makam Pahlawan
Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota probolinggo dalam kurun waktu terakhir ini tersaji dalam gambaran sebagai berikut

Tabel 2.6
Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo) *

No	Tahun	Persentase
1	2014	8,37
2	2015	8.17
3	2016	7.97
4	2017	7.84
5	2018	7.2
6	2019	6.91
7	2020	7.43
8	2021	7.44
9	2022	6.65
10	2023	6.48

* Sumber data : BPS 19

2.3.2 Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

DENGAN DITETAPKANNYA PP NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS, MAKA KEWENANGAN PELAKSANAAN REHABSOS MENJADI LEBIH EFEKTIF. PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SPM BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN/KOTA, SALAH SATU INDIKATORNYA ADALAH REHABILITASI SOSIAL (REHABSOS) DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PD) DENGAN KEWENANGAN PROVINSI ADALAH REHABSOS DI DALAM PANTI DAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA ADALAH REHABSOS DI LUAR PANTI.

STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YAITU PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI SOSIAL DILAKUKAN DALAM BENTUK LAYANAN:

-
- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti;
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota.

NILAI KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL KOTA PROBOLINGGO ADALAH 99.47% DENGAN RINCIAN CAPAIAN SERTA JENIS LAYANAN TERCANTUM PADA TABEL DIBAWAH INI :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial
Kota Probolinggo Tabel (T-C.23).

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Capaian SPM urusan sosial																		
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100	74,44 %	100%	100 %	N/A	100	74,44 %	100 %	100 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh	-	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	0	77,42 %	100%	100 %	N/A	0	77,42 %	100 %	100 %

		Terlantar diluar panti	rehabilitasi sosial di luar panti																
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100	80,95 %	98,67 %	100 %	N/A	100	80,95 %	0,98 67	100 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	0	88,77 %	98,67 %	100 %	N/A	0	88,77 %	99%	100 %

		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100	98,29 %	100%	100 %	N/A	100	98,29 %	100 %	100 %
	Urusan Sosial																		
			Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	766 68	850 89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	-	139 8	227 9	N/A	N/A	N/A	226 0	718 19	N/A	N/A	N/A	162 %	31,5 13	N/A	N/A	N/A
			persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			hidup mandiri																
			potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	-	325	325	N/A	N/A	N/A	325	325	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A
			Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	-	15	15	N/A	N/A	N/A	16	18	N/A	N/A	N/A	107 %	120 %	N/A	N/A	N/A
	Urusan PPPA																		
			Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1840	1702	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,43	50.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	270 09	950 0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Indeks Pemberdayaan Gender	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,0 2	65.9 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,5 1	95.8 7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kota Layak Anak	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah kasus kekerasan anak yang mendapat perlindungan dan pengawasan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase pekerja anak yang mendapatkan perlindungan dan pengawasan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	n.a		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah anak usia 0-18 tahun yang berhadapan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			dengan hukum															
			Jumlah laporan kekerasan anak	-	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah laporan kekerasan perempuan	-	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah KDRT	-	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.8

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				99.47 %
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	224	224	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.0
	1. Layanan data dan pengaduan	150	150	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	4. Penyediaan permakanan	74	74	0	100.00 %
	5. Penyediaan sandang	150	150	0	100.00 %
	6. Penyediaan alat bantu	15	15	0	100.00 %
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	150	150	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	150	150	0	100.00 %
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	150	150	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100.00 %
	11. Akses ke layanan pendidikan	10	10	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100.00 %
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	0	100.00 %
	14. Layanan rujukan	45	45	0	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	1,022	1,022	0	100.00 %
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	50	50	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	10	10	0	100.00 %
	2. Penyediaan permakanaan	26	26	0	100.00 %
	3. Penyediaan sandang	26	26	0	100.00 %
	4. Penyediaan alat bantu	2	2	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	2	2	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	26	26	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	2	2	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan	10	10	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan	10	10	0	100.00 %
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	147	147	0	100.00 %
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				98.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	60	60	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.67 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	93.33 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1. Layanan data dan pengaduan	20	20	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	50	50	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	12	12	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	9	9	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	50	50	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	50	50	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1	1	0	100.00 %
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	12	12	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	0%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	12	12	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	5	5	0	100.00 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	236	236	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				98.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	100	100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.67 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	93.33 %
	1. Layanan data dan pengaduan	100	100	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	100	100	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	100	100	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	100	100	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100	100	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	100	100	0	100.00 %
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan	25	25	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	25	25	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	778	778	0	100.00 %
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	300	300	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1. Penyediaan permakanan	300	300	0	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	20	20	0	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	85	85	0	100.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	85	85	0	100.00 %
	JUMLAH	491	491	0	100.00 %

Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1.	APBD	Rp. 2.446.011.190,-
2.	Provinsi	
	KUBE (Kelompok Usaha Bersama	Rp. 297.000.000,-
	ASLUT	Rp. 41.400.000,-
	ASPDB	Rp. 93.600.000,-
	Panti Asuhan	Rp. 0,-
	Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak	Rp. 0,-
2.	APBN	
	KUBE (Kelompok Usaha Bersama	Rp. 0,-
	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Rp. 46.519.200.000,-
	PKH	Rp. 25.572.700.000,-
	ASLUT	Rp. 0,-
	ASPDB	Rp. 136.800.000,-
	Panti Asuhan	Rp. 0,-
	Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak	Rp. 23.600.000,-
3.	Sumbangan pihak donatur bagi PMKS	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 75.972.711.190,-

3. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kelompok sasaran layanan yang spesifik, fokus pada upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran yang biasanya menjadi fokus dalam layanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Perempuan Korban Kekerasan:

Memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia. Anak-Anak Korban Kekerasan atau Peralihan:

2. Menyediakan perlindungan khusus dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi seksual, atau perdagangan manusia.
3. Anak Jalanan:
Memberikan dukungan kepada anak-anak yang tinggal atau bekerja di jalanan, termasuk penyediaan tempat perlindungan dan upaya reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Anak Dalam Konflik dengan Hukum:
Memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, dengan fokus pada proses pemulihan dan reintegrasi.
5. Perempuan dan Anak Difabel:
Menyediakan layanan khusus untuk perempuan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau difabel, termasuk aksesibilitas dan dukungan rehabilitasi.
6. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:
Melakukan program pemberdayaan ekonomi yang terfokus pada perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil.
7. Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Anak:
Melakukan program pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan anak di sekolah, keluarga, dan komunitas.
8. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan:
Mendorong pemberdayaan perempuan melalui peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan, serta memberikan dukungan pendidikan untuk perempuan dewasa.
9. Korban Perdagangan Manusia:
Memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia, terutama yang terkait dengan eksploitasi seksual atau pekerjaan paksa.
10. Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Anak:
Mengembangkan program pencegahan pernikahan anak dan memberikan dukungan bagi anak-anak yang telah menjadi korban pernikahan anak.
11. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Komunitas:
Mengadakan kampanye dan program pencegahan kekerasan di tingkat komunitas untuk menciptakan kesadaran dan mengubah norma sosial.
12. Anak Terlantar atau Tanpa Orang Tua:
Memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terlantar atau tidak memiliki orang tua yang dapat memberikan perhatian dan dukungan.

Dalam memberikan pelayanan kelompok sasaran ini mencakup perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak-anak yang berada dalam

situasi rentan atau berisiko terhadap kekerasan dan eksploitasi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Mitra kerja Sebagai Berikut

1. Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 3. Dinas Sosial Provinsi
 4. Dinas Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
 6. UPT Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Daerah Ngopak dan Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan
 7. UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Kota Malang
 8. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
 9. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman W. Lawang Kabupaten Malang
 10. Kepolisian Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 11. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terkait dengan Rehabilitasi Anak Korban NAPZA
4. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Sosial
- a. Kepolisian Republik Indonesia Resot Kota Probolinggo
 - b. BULOG Kota Probolinggo.
 - c. BPJS Kesehatan (PBI JKN)

Tabel 2.10

Program dan Kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Serta Realisasinya Tahun 2022

N o	PRO GR AM	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA PROBOLINGGO				1.283.676.570	1.166.768.657	90.89%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.283.676.570	1.166.768.657	90.89%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736			1.131.511.300	1.018.531.657	90.02%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	803.263.000	757.127.320	94.26%
		2	Penyediaan sandang	Orang	199.905.500	150.847.801	75.46%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	65.875.000	50.825.000	77.15%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22.144.500	21.072.250	95.16%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	2.500.000	2.500.000	100.0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	2.527.500	2.527.500	100.0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	855.000	840.000	98.25%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	320.000	315.000	98.44%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	2.740.500	2.740.500	100.0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	9.505.300	9.370.000	98.58%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.875.000	1.875.000	100.0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokume n	20.000.000	18.491.286	92.46%
	JUMLAH INDIKATOR				1.131.511.300	1.018.531.657	90.02%

	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K20220131040943			152.165.270	148.237.000	97.42%
		1	Penyediaan makanan	Orang	4.704.500	2.472.000	52.55%
		2	Penyediaan sandang	Orang	510.770	325.000	63.63%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	61.800.000	60.300.000	97.57%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	84.000.000	84.000.000	100.0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.150.000	1.140.000	99.13%
	JUMLAH INDIKATOR				152.165.270	148.237.000	97.42%
	JUMLAH PROGRAM				1.283.676.570	1.166.768.657	90.89%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai ‘proses perubahan sosial yang terencana didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Secara spesifik, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo sebagai berikut :

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
- 3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum
- 5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender

Dan untuk mencapai pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial PPPA dan partisipasi masyarakat.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, , hubungan masyarakat dan protokol.

Dari implementasi fungsi Sekreatriat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial.
- b. Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.

b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial.

==

Dari implementasi fungsi Program Pelayanan dan rehabilitasi sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- a. Implikasi ditutupnya beberapa lokalisasi di daerah lain menjadikan munculnya WRSE di kota probolinggo. Dengan demikian dibutuhkan model dan metode yang tepat untuk mendukung proses tersebut.
- b. Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat.
- c. Koordinasi teknis di tingkat Kecamatan/Kelurahan dalam rangka pelayanan sosial yang berbasis masyarakat.
- d. Masih ada psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat dalam kegiatan yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung.

c) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan partisipasi sosial.

Dari implementasi fungsi Program Pemberdayaan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- a. Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat.
- b. Model pemberdayaan sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari penyelenggara pemerintahan serta minimnya usulan model pemberdayaan dari penerima manfaat.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial dan advokasi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Dari implementasi fungsi program Perlindungan dan Jaminan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala / masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

- a. Perlindungan sosial masih memerlukan pelayanan yang implementif seperti melalui advokasi sosial dan sheltered bagi AMPK maupun KTK.
- b. Penanganan korban bencana masih dalam tahap evakuasi, padahal proses mengembalikan fungsi sosial korban secara berkelanjutan merupakan arah penting

untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap kabupaten/kota yang rawan bencana.

Secara umum permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kota Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (kewenangan SKPD)	EKSTERN AL (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya sinergitas lintas sector	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Masih besarnya angka kemiskinan dan ketimpangan disparitas wilayah, urbanisasi serta permasalahan hukum ketenagakejaan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang menimbulkan perkembangan variasi permasalahan	Indeks Pembangunan manusia dan SPM	Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan

	kesejahteraan sosial				
--	----------------------	--	--	--	--

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga belum optimal dalam berperan dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkauan dinas Sosial Kota Probolinggo dalam memberdayakan sumber dalam masyarakat	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
	Resistensi sebagian wilayah Kota Probolinggo sebagai daerah rawan bencana	SPM bidang Sosial	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
	Kondisi kemajemukan masyarakat Kota probolinggo berpotensi terjadinya bencana sosial	SPM bidang Sosial	Koordinasi Pemetaan dan antisipasi bencana sosial yang masih harus ditingkatkan	Perkembangan resisitensi SARA dan perkembangan Politik Praktis	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana sosial yang belum merata dan belum optimal
	Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan jumlah pegawai dalam memberdayakan PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat

Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan local, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	SPM bidang Sosial	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan local, kegotong-royongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Berkembangnya nilai nilai individualisasi masyarakat	Daya dukung Dinas Sosial Kota belum optimal dalam mengem,bangkan nilai kesetiakawanan sosial
	Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial.	SPM Bidang sosial	Terbatasnya kualitas SDM yang professional dalam pelayanan social	Minimnya Kerjasama DIKLAT Profesi	Terbatasnya daya tampung dan kualitas aparatur profesi pekerjaan sosial serta anggaran yang tersedia
	Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	SPM Bidang sosial	Sarana prasarana pelayanan berupa Panti sosial terhadap PMKS masih terbatas	Terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD	Anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran pelayanan melalui panti sosial masih terbatas
Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi	Program-program kementerian sebagaimana tertuang dalam Renstra K/L mendukung pencapaian target SPM bidang sosial Kota Probolinggo meskipun belum maksimal	SPM bidang sosial	Dukungan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Mekanisme perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial	Kemampuan pelayanan tidak sebanding dengan target SPM yang ditetapkan

Hasil telaahan RTRW	Pembentukan Kampung Siaga Bencana belum dilakukan secara merata pada daerah-daerah rawan bencana sebagaimana tertuang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo	SPM bidang Sosial dan RTRW Prov. Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Dukungan sarana dan mobilitas kesiapsiagaan bencana yang belum merata dan belum optimal
Hasil analisis KLHS	Masih terjadi resistensi kesiap-siagaan masyarakat di lingkungan/wilayah rawan bencana serta masih besarnya potensi lignkungan sosial budaya yang memicu konflik/bencana sosial	SPM bidang Sosial dan kebijakan KLHS	Pemetaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta kegiatan yang mendukung keharmonisan sosial perlu ditingkatkan	Kondisi Sosio, Kultur dan Geografis daerah	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesiap-siagaan bencana alam dan social

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Regional	Dinamika Nasional	Jawa Timur
1	Capaian target SDG's sampai tahun 2018 masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Perdagangan bebas (terutama pada regional asia) yang memberi dampak daya saing produk nasional melemah, terutama pada sektor UMKM,	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program (PKH, BOS, JKN dll), Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan,	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi (5,8 %) dengan angka kemiskinan di Kota Probolinggo (7,20 %), berimplikasi pada berkembangnya PMKS jalanan.
2	Permasalahan pelanggaran Hak Azasi manusia yang berdampak pada permasalahan kesejahteraan sosial dan hukum	Konflik SARA di beberapa Negara ASEAN	Keragaman budaya, kebebasan beragama,	Keragaman kultur Kota probolinggo dapat memicu potensi konflik sosial, Masih terdapatnya jumlah psikotik pasung (2 orang)
3	Perubahan Iklim Global	Wilayah regional di Asia Pasifik sebagai wilayah rawan bencana	Indonesia sebagai Negara kepulauan pertemuan dua samudera, daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, serta menjadi jalur api dunia yang rawan terjadinya bencana	Kota Probolinggo terutama pada wilayah pesisir utarayang rawan bencana serta terdapat 8 gunung berapi aktif serta terdapat 2 aliran sungai besar yang berpotensi bencana banjir dan kelabilan tanah longsor
4	Jaringan obat terlarang Napza International	Indonesia menjadi jalur distribusi peredaran Narkotika Obat terlarang dan NAPZA antar Negara ASEAN	Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi daerah produksi dan	Terdapatnya jumlah pemakai Narkoba / NAPZA di Kota Probolinggo

			peredaran Obat terlarang,	sejumlah 40 orang
4	Tuntutan akuntabilitas pelayanan		Permasalahan pelayanan publik	Sarana dan prasana fisik pelayanan di Dinas dan Shelter masih kurang

3.2 Isu Strategis Pelayanan Perangkat DAerah

3.2.1 Isu Strategis Urusan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dan kesulitan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial melibatkan kebijakan dan program-program untuk membantu mereka melewati situasi sulit. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan:

- 1) Kemiskinan dan Pengangguran: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi risiko kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Program-program yang membantu mereka mengakses pelatihan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau memberikan dukungan keuangan dapat membantu mengatasi isu ini.
- 2) Perumahan dan Ketersediaan Rumah: Masalah perumahan seringkali menjadi kendala bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kebijakan perumahan yang terjangkau, program bantuan perumahan, dan upaya untuk mengatasi tunawisma menjadi isu strategis dalam konteks ini.
- 3) Kesehatan Mental dan Fisik: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental dan fisik. Layanan kesehatan mental yang terjangkau dan dukungan kesehatan yang holistik menjadi isu kritis.
- 4) Pendidikan dan Keterampilan: Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Kebijakan pendidikan inklusif dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi isu strategis.
- 5) Diskriminasi dan Stigma: Penyandang masalah kesejahteraan sosial sering menghadapi diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat integrasi mereka dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu ini menjadi isu strategis penting.

- 6) Keamanan Sosial: Perlindungan sosial dan jaringan keamanan sosial menjadi isu strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau situasi krisis. Program bantuan sosial yang efektif dapat membantu menyediakan perlindungan finansial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 7) Kekerasan dan Keamanan: Penyandang masalah kesejahteraan sosial mungkin rentan terhadap situasi kekerasan atau ketidakamanan. Membangun lingkungan yang aman dan memberikan dukungan bagi mereka yang menghadapi kekerasan adalah isu strategis.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi isu strategis.
- 9) Keterlibatan Keluarga dan Jaringan Dukungan: Membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial, termasuk peran keluarga, adalah penting bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas menjadi isu strategis dalam konteks ini.
- 10) Akses Layanan Sosial dan Hukum: Memastikan akses yang mudah dan adil ke layanan sosial, kesehatan, dan hukum adalah isu strategis. Hal ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan tersebut.
- 11) Isu inklusif disabilitas menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Inklusivitas disabilitas bukan hanya tentang memahami dan mengakui keberagaman kondisi fisik dan mental, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Saat kita merenungi perjalanan seseorang yang hidup dengan disabilitas, kita menyadari bahwa inklusivitas bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi suatu prinsip yang mendefinisikan kemanusiaan kita bersama. Ini adalah panggilan untuk menyusun fondasi masyarakat yang memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan.

Namun, upaya inklusif tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan pendidikan. Masyarakat perlu memberikan dukungan emosional dan sosial yang memadai bagi

individu dengan disabilitas. Stigma dan diskriminasi harus dihadapi dan diubah, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima tanpa syarat.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2.2 Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah fokus penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam konteks ini melibatkan upaya untuk meningkatkan posisi dan perlindungan perempuan serta anak-anak. Berikut adalah beberapa isu strategis terkait:

- 1) Pendidikan Inklusif dan Setara: Memastikan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak adalah langkah penting untuk memberdayakan mereka. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung akses perempuan ke peluang ekonomi, termasuk pekerjaan layak dan kesempatan berwirausaha, adalah esensial untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Kebijakan dukungan seperti pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan dapat membantu.
- 3) Kesehatan Reproduksi dan Hak Kesehatan Perempuan: Menjamin akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas, termasuk informasi tentang hak-hak mereka, merupakan isu strategis. Ini mencakup akses terhadap kontrasepsi, perawatan prenatal, dan penanganan masalah kesehatan reproduksi.
- 4) Pemberdayaan Politik dan Partisipasi: Memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki perwakilan yang lebih besar di berbagai tingkatan pemerintahan adalah isu strategis. Ini dapat mencakup implementasi kuota gender dan program pelatihan kepemimpinan.
- 5) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta memberikan perlindungan yang efektif adalah isu strategis. Hal ini mencakup penguatan hukum, penegakan hukum yang efektif, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban.

- 6) Penghapusan Praktik-praktik Berbahaya: Memberantas praktik-praktik berbahaya seperti mutilasi genital perempuan (FGM), pernikahan anak, dan perdagangan manusia adalah bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan.
- 7) Akses ke Layanan Kesehatan Anak: Memberikan akses yang setara dan berkualitas terhadap layanan kesehatan anak, termasuk vaksinasi, perawatan prenatal, dan perawatan kesehatan anak-anak, adalah isu strategis.
- 8) Pendidikan dan Perlindungan Anak: Memastikan anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan aman dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan merupakan isu strategis. Perlindungan anak-anak dari pekerjaan anak dan eksploitasi seksual adalah perhatian utama.
- 9) Media dan Budaya: Mengatasi representasi perempuan dan anak-anak dalam media serta budaya yang mendukung kesetaraan dan menghormati hak-hak mereka merupakan isu strategis.
- 10) Kesetaraan Hak Asasi Manusia: Mendorong kesetaraan hak asasi manusia untuk perempuan dan anak-anak, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah tujuan strategis.
- 11) Pencapaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kesadaran, pendidikan, dan implementasi kebijakan yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi perempuan dan anak-anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial .

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo akan melaksanakan 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Pemerintah yaitu misi ke 3 (tiga).

Peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi pemberdayaan dan pembinaan terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya sebagai upaya percepatan pengentasan PMKS dan pengarusutamaan gender dalam menciptakan perempuan berdaya saing dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya .

Tabel 4.1
Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah tahun 2025 - 2026

No	Misi	Tujuan	IKD	Satuan	Kondisi awal kinerja	Target		Kondisi Akhir
					2022	2025	2026	2026
1	Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin	%	6.65	6.23	6.22	6.22
			Indeks Gini	%	0.322	0.295	0.291	0.291

Sumber: RPD Tahun 2025-2026

Tabel 4.2
Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah tahun 2025 - 2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
	Indikator	Satuan	Kinerja awal (2022)	Target Kinerja	
				2025	2026
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	%	48.82	42	40
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	29.24	96.80	96.98

Sumber : RPD Tahun 2025-2026

☑ Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sosial mengacu pada RPJMD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:

WISDA	MEMBANTU PENERAPAN KEBERKESAMAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT				
TUJUAN RPD	MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN				
SASARAN RPD	MENINGKATNYA CAPAIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT				
TUJUAN PD	MENINGKATNYA CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT				
	INDIKATOR TUJUAN	1. PERSENTASE PMKS 2. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER			
SASARAN PD	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Tumbuh Kembang Anak		Meningkatkan Manajemen Perkantoran
IKU PD	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Nilai Evaluasi Pengarusutamaa Gender	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani	Kategori Kota Layak Anak	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2025 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke	
			Tujuan / Sasaran	2025	2026
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS	33	35
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	89	89.5
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	96.8	96.98
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	100
			Kategori Kota Layak Anak	Utama	Utama

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2026, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada periode ini . Arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPD 2025-2026, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Secara tugas dan fungsi, dinas sosial mempunyai tujuan pengentasan kemiskinan melalui Penurunan jumlah PMKS dan peningkatan Pengarusutamaan gender, Strategi peningkatan sistem kesejahteraan sosial masyarakat yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Adapun strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan peran dinas dalam keberdayaan dan pembangunan gender Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Tabel T-C.26.)

Visi : Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan			
Misi : Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Efektivitas pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial yang bagi yang membutuhkan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar serta kesejahteraan sosial bagi PMKS
		Peningkatan kualitas Data keluarga miskin/rentan	Meningkatkan validitas data penerima bantuan sosial
		Melakukan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Lembaga, Karang Taruna dan Sistem nilai yang mendukung	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar serta kesejahteraan sosial bagi PMKS

Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas SDM PPRG dan kelembagaan PUG	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi
		Memberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang bisa meningkatkan pengetahuan perempuan sehingga dapat berdaya mandiri	Meningkatkan kualitas perempuan melalui pemberdayaan perempuan
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Memberikan advokasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum	Membuat Kebijakan tentang Kesejahteraan Sosial, yang juga mengatur tentang advokasi anak yang berhadapan dengan hukum
		Memberikan pembinaan terhadap pendamping sosial anak atau pekerja sosial anak	Meningkatkan kualitas pendamping sosial anak atau pekerja sosial anak
		Menberikan fasilitasi lingkungan kota yang layak anak dan menjamin hak setiap anak sebagai warga kota	Meningkatkan indeks Kota Layak Anak
	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan administrasi	Meningkatkan Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Perumusan strategi dan kebijakan tersebut akan di terjemahkan dengan bentuk kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan integrasi sosial. Berikut adalah beberapa strategi dan arah kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut:
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:
Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Menyediakan akses pendidikan yang inklusif bagi PMKS, termasuk program pendidikan non-formal dan informal.
4. Kesehatan dan Layanan Rehabilitasi:
Memastikan akses PMKS ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk rehabilitasi fisik dan mental.
5. Mendorong penyediaan layanan kesehatan komprehensif yang memahami dan mengakomodasi kebutuhan khusus PMKS.
6. Pemberdayaan Ekonomi:
Mengembangkan peluang ekonomi melalui program bantuan keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan akses ke pekerjaan layak. dengan mendorong inklusi ekonomi dengan memberikan dukungan bagi PMKS untuk terlibat dalam sektor formal dan informal.
7. Akses Terhadap Layanan Sosial:
Meningkatkan akses PMKS ke jaringan keamanan sosial dan layanan pendukung sosial, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan keluarga.
8. Memperkuat kerjasama antara lembaga sosial, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan koordinasi layanan.
9. Membangun partisipasi PMKS dalam pengambilan keputusan dan proyek-proyek yang memengaruhi kehidupan mereka.
10. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan:
11. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak PMKS dan memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan.
12. Menerapkan kebijakan perlindungan yang efektif dan memperkuat sistem penegakan hukum untuk melindungi PMKS dari eksploitasi dan kekerasan.
13. Inklusi dalam Rancangan Kebijakan Umum:
Memastikan bahwa kebijakan umum di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan ramah disabilitas dan mendukung inklusi PMKS.
14. Menyusun rancangan kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman kondisi PMKS dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada.
15. Teknologi Dukungan:
Mengembangkan dan menyediakan akses PMKS ke teknologi dukungan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka.
Memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh PMKS.

16. Pengembangan Kerjasama:

Membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya.

Menggali potensi relawan dan sukarelawan untuk membantu mendukung PMKS dalam berbagai aspek kehidupan.

17. Monitoring dan Evaluasi:

Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan dan program.

18. Mengadopsi siklus umpan balik yang terus-menerus agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

19. Melalui implementasi strategi-strategi ini, diharapkan PMKS dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan kemandirian, dan merasa terlibat secara positif dalam masyarakat. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah peningkatan kualitas dan kemampuan PMKS.

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan serangkaian strategi dan kebijakan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa arah kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut:

1) Penegakan Hukum dan Keadilan:

Meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Memperkuat sistem peradilan anak dan peradilan keluarga untuk memberikan keadilan yang cepat dan tepat.

2) Pendidikan Kesetaraan Gender:

Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah.
Mendorong partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan memberikan dukungan bagi mereka untuk mengejar pendidikan tinggi.

3) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak:

Mengembangkan kampanye kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menyediakan pelatihan dan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta konsekuensi kekerasan.

4) Layanan Kesehatan Reproduksi:

Menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perawatan prenatal dan posnatal serta memberikan dukungan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

5) Perlindungan Anak dan Hak Anak:

Memperkuat sistem perlindungan anak dan mekanisme pelaporan kekerasan terhadap anak.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak dan perlindungan terhadap eksploitasi, pekerja anak, dan kekerasan.

6) Pemberdayaan Perempuan:

Mendukung program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi.

Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.

7) Lingkungan Aman dan Dukungan Psikososial:

Menyediakan tempat-tempat aman untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Menyediakan layanan dukungan psikososial untuk membantu mereka yang telah mengalami trauma.

8) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga:

Mengembangkan program bantuan keuangan dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Mendorong kebijakan yang mendukung pekerjaan yang layak dan upah yang adil.

9) Pencegahan Eksploitasi dan Trafficking:

Meningkatkan pengawasan terhadap potensi eksploitasi dan perdagangan manusia.

Mengembangkan program preventif yang mengurangi risiko eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

10) Pendidikan Orangtua dan Keluarga:

Menyediakan program pendidikan bagi orangtua dan keluarga tentang peran mereka dalam perlindungan anak dan perempuan.

Mendorong praktik-praktik positif dalam mendidik anak dan membangun hubungan yang sehat dalam keluarga.

11) Kerjasama Lintas Sektor:

Membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah perlindungan perempuan dan anak secara holistik.

Mendukung dan memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk penanganan kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan.

Implementasi strategi dan kebijakan ini memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan komitmen kuat dari pemerintah dan pihak terkait untuk menciptakan

lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi perempuan dan anak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2025 - 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 yaitu Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1. Pengadaan Mebel
- 1.8.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.1.4 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 3.1.1. Penyediaan Permakanan
- 3.1.2. Penyediaan Sandang

- 3.1.3. Penyediaan Alat Bantu
- 3.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 3.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 3.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 3.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 3.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 3.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan
- 3.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 3.1.12. Pemberian Layanan Rujukan

3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- 3.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 3.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan
- 3.2.3. Penyediaan Permakanan
- 3.2.4. Penyediaan Sandang
- 3.2.5. Penyediaan Alat Bantu
- 3.2.6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- 3.2.7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3.2.8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 3.2.9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 3.2.10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 3.2.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 3.2.12. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 3.2.13. Pemberian Layanan Rujukan
- 3.2.14. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

4.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- 4.1.1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4.2.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- 5.1.1. Penyediaan Makanan
- 5.1.2. Penyediaan Sandang
- 5.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- 5.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 5.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial

5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- 5.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- 6.1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 6.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 6.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

7.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- 7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- 7.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7.1.3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 7.1.4. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

7.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 7.2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 7.2.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

8.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 8.1.1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

9.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 9.1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9.1.2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

10.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota

- 10.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

10.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- 10.2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10.2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 10.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10.3.2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

11.1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota

- 11.1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 11.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

11.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

- 11.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota
- 11.2.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- 11.2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

12. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

12.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 12.1.1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

12.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota

- 12.2.1. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

12.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 12.3.1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

13.1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 13.1.1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 13.1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 13.1.3. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 13.1.4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 6.1

Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100%	100 Persen	7.319.784.791	100 Persen	7.913.395.198	100 Persen	15.233.179.989	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100%	100 Persen	81.500.000	100 Persen	85.750.000	100 Persen	167.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 Dokumen	16.500.000	5 Dokumen	18.750.000	5 Dokumen	35.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	67.000.000	4 Laporan	132.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100 Persen	6.168.885.791	100 Persen	6.764.074.698	100 Persen	12.932.960.489	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	42 Orang	6.014.385.791	42 Orang	6.598.974.698	42 Orang	12.613.360.489	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	700 Dokumen	94.500.000	700 Dokumen	100.100.000	700 Dokumen	194.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	4 laporan	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	125.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100 Persen	12.287.000	100 Persen	13.962.500	100 Persen	26.249.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1 Laporan	12.287.000	1 Laporan	13.962.500	1 Laporan	26.249.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100%	100 Persen	36.000.000	100 Persen	54.000.000	100 Persen	90.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	60 paket	24.000.000	60 paket	30.000.000	60 paket	54.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokume n	12 dokume n	12.000.000	12 dokumen	24.000.000	12 dokume n	36.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100%	100 Persen	271.631.000	100 Persen	170.176.000	100 Persen	441.807.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 Paket	32.515.000	4 Paket	28.000.000	4 Paket	60.515.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 Paket	28.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	48.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 Paket	9.306.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	14.306.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	12 Dokume n	3.432.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokume n	5.832.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	9.900.000	6 Laporan	6.000.000	6 Laporan	15.900.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	135.645.000	24 Laporan	72.776.000	24 Laporan	208.421.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	12 Dokumen	52.833.000	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	88.833.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100%	100 Persen	49.115.000	100 Persen	55.812.000	100 Persen	104.927.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 unit	5 Unit	22.825.000	5 Unit	25.937.000	5 Unit	48.762.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 Unit	26.290.000	5 Unit	29.875.000	5 Unit	56.165.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100%	100 Persen	373.666.000	100 Persen	399.620.000	100 Persen	773.286.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 Laporan	8.163.000	4 Laporan	9.276.000	4 Laporan	17.439.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 laporan	11 Laporan	122.843.000	11 Laporan	139.594.000	11 Laporan	262.437.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	22.660.000	1 Laporan	25.750.000	1 Laporan	48.410.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	445.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 Persen	326.700.000	100 Persen	370.000.000	100 Persen	696.700.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	42.000.000	1 Unit	47.000.000	1 Unit	89.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 Unit	155.000.000	29 Unit	175.000.000	29 Unit	330.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	30 Unit	13.200.000	30 Unit	15.000.000	30 Unit	28.200.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	73 Unit	42.500.000	73 Unit	49.000.000	73 Unit	91.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 Unit	74.000.000	4 Unit	84.000.000	4 Unit	158.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80%	81 Persen	89.608.307	82 Persen	80.084.586	82 Persen	169.692.893	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80%	80 Persen	89.608.307	80 Persen	80.084.586	80 Persen	169.692.893	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29 orang	29 Orang	15.000.000	29 Orang	11.000.000	29 Orang	26.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 Orang	67.608.307	5 Orang	63.034.586	5 Orang	130.642.893	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 lembaga	14 Lembaga	5.000.000	14 Lembaga	4.200.000	14 Lembaga	9.200.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 sertifikat	1 Sertifikat	2.000.000	1 Sertifikat	1.850.000	1 Sertifikat	3.850.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85%	86 Persen	2.063.349.516	87 Persen	1.887.207.883	87 Persen	3.950.557.399	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	80 Persen	1.659.250.000	80 Persen	1.543.000.000	80 Persen	3.202.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	901.250.000	100 Orang	840.000.000	100 Orang	1.741.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	25.000.000	100 Orang	20.000.000	100 Orang	45.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	180.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	32.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	62.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	225.000.000	100 Orang	215.000.000	100 Orang	440.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	225.000.000	100 Orang	215.000.000	100 Orang	440.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	2.000.000	10 Orang	2.000.000	10 Orang	4.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	4.000.000	20 Orang	4.000.000	20 Orang	8.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	5.000.000	10 Orang	2.000.000	10 Orang	7.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	60.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	35.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	65.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80%	80 Persen	404.099.516	80 Persen	344.207.883	80 Persen	748.307.399	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	2.002.016	75 Orang	1.500.000	75 Orang	3.502.016	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	4.000.000	60 Orang	3.000.000	60 Orang	7.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	60.000.000	300 Orang	47.039.383	300 Orang	107.039.383	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	75.000.000	100 Orang	71.387.000	100 Orang	146.387.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	185.000.000	17 Orang	153.000.000	17 Orang	338.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	2.500.000	75 Orang	2.250.000	75 Orang	4.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	10.000.000	75 Orang	8.250.000	75 Orang	18.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	13.400.000	50 Orang	14.500.000	50 Orang	27.900.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	6.250.000	75 Orang	6.500.000	75 Orang	12.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	7.500.000	75 Orang	8.000.000	75 Orang	15.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	4.785.000	25 Orang	5.437.500	25 Orang	10.222.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	10.000.000	20 Orang	5.687.500	20 Orang	15.687.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	15.000.000	20 Orang	7.812.500	20 Orang	22.812.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	8.662.500	2 Dokumen	9.844.000	2 Dokumen	18.506.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	30%	41 Persen	642.504.674	42 Persen	599.172.429	42 Persen	1.241.677.103	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50%	50 Persen	642.504.674	50 Persen	599.172.429	50 Persen	1.241.677.103	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800 orang	800 Orang	410.000.000	800 Orang	405.000.000	800 Orang	815.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 keluarga	120 Keluarga	82.504.674	120 Keluarga	64.172.429	120 Keluarga	146.677.103	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117 orang	116 Orang	150.000.000	116 Orang	130.000.000	116 Orang	280.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan	80%	81 Persen	435.468.693	82 Persen	429.532.835	82 Persen	865.001.528	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80%	80 Persen	215.000.000	80 Persen	204.532.835	80 Persen	419.532.835	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	30.000.000	500 Orang	23.250.000	500 Orang	53.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	30.000.000	250 Orang	31.282.835	250 Orang	61.282.835	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.06.2.01.003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.01.004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	140.000.000	100 Orang	130.000.000	100 Orang	270.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	5.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	15.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80%	80 Persen	220.468.693	80 Persen	225.000.000	80 Persen	445.468.693	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	225 Orang	220.468.693	225 Orang	225.000.000	225 Orang	445.468.693	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	85%	86 Persen	179.853.091	87 Persen	163.946.990	87 Persen	343.800.081	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90%	90 Persen	179.853.091	90 Persen	163.946.990	90 Persen	343.800.081	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.07.2.01.001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	39.053.091	1 Dokumen	19.546.990	1 Dokumen	58.600.081	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		1.06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70 makam	1 Makam	40.000.000	1 Makam	40.000.000	1 Makam	80.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 laporan	24 Laporan	100.800.000	24 Laporan	104.400.000	24 Laporan	205.200.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51%	53 Persen	192.471.426	54 Persen	199.046.551	54 Persen	391.517.977	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55%	55 Persen	66.400.000	55 Persen	70.046.551	55 Persen	136.446.551	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	31.400.000	2 Dokumen	34.700.000	2 Dokumen	66.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.346.551	100 Orang	70.346.551	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6%	6 Persen	126.071.426	6 Persen	129.000.000	6 Persen	255.071.426	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	2 Dokumen	55.571.426	2 Dokumen	57.000.000	2 Dokumen	112.571.426	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.02.2.02.002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 organisasi	23 Organisasi	70.500.000	23 Organisasi	72.000.000	23 Organisasi	142.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100 Persen	192.392.144	100 Persen	196.912.342	100 Persen	389.304.486	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100%	100 Persen	2.042.144	100 Persen	2.172.342	100 Persen	4.214.486	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 Dokumen	2.042.144	2 Dokumen	2.172.342	2 Dokumen	4.214.486	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	100%	100 Persen	155.500.000	100 Persen	157.840.000	100 Persen	313.340.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 orang	24 Orang	67.500.000	24 Orang	69.840.000	24 Orang	137.340.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 layanan	100 Layanan	88.000.000	100 Layanan	88.000.000	100 Layanan	176.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100%	100 Persen	34.850.000	100 Persen	36.900.000	100 Persen	71.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41 orang	41 Orang	34.850.000	41 Orang	36.900.000	41 Orang	71.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan	30%	41 Persen	6.078.323	42 Persen	6.857.000	42 Persen	12.935.323	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30%	30 Persen	6.078.323	30 Persen	6.857.000	30 Persen	12.935.323	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokumen	6.078.323	1 Dokumen	6.857.000	1 Dokumen	12.935.323	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80%	91 Persen	571.245.044	92 Persen	541.644.786	92 Persen	1.112.889.830	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70%	70 Persen	47.000.000	70 Persen	44.000.000	70 Persen	91.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.06.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 organisasi	10 Organisasi	22.000.000	10 Organisasi	22.000.000	10 Organisasi	44.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	47.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	85%	80 Persen	524.245.044	80 Persen	497.644.786	80 Persen	1.021.889.830	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Dokumen	29 Dokumen	50.750.000	29 Dokumen	39.150.000	29 Dokumen	89.900.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 Dokumen	397.500.000	3 Dokumen	384.000.000	3 Dokumen	781.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 dokumen	1 Dokumen	75.995.044	1 Dokumen	74.494.786	1 Dokumen	150.489.830	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	100%	100 Persen	276.960.119	100 Persen	300.155.475	100 Persen	290.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100 Persen	61.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	126.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 orang	20 orang	61.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	126.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	100 Persen	165.960.119	100 Persen	180.155.475	100 Persen	346.115.594	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.08.07.2.02.007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Layanan	15 Layanan	165.960.119	15 Layanan	180.155.475	15 Layanan	346.115.594	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	70 Persen	70 Persen	50.000.000	70 Persen	55.000.000	70 Persen	105.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.08.07.2.03.006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	105.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90%	91 Persen	1.115.113.321	92 Persen	1.165.431.258	92 Persen	2.280.544.579	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90%	90 Persen	1.115.113.321	90 Persen	1.165.431.258	90 Persen	2.280.544.579	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.13.05.2.01.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	51.750.000	1 Dokumen	54.750.000	1 Dokumen	106.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

		2.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	920.000.000	2 Lembaga	960.000.000	2 Lembaga	1.880.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	136.763.321	1 Laporan	143.181.258	1 Laporan	279.944.579	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo
		2.13.05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	14.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Probolinggo

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Probolinggo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	IKU
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS (penurunan)	Meningkatnya kualitas dan kemampuan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani
			Kategori Kota Layak Anak

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Penetapan Target

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2025	2026	2026	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SOSIAL					
1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88,00 %	89,00%	89,50%	89,50%	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.1	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama	Utama	Utama	
2.2	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.3	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Utama	Utama	Utama	

Indikator Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan komposit dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, yakni di tahun 2025-2026 dengan program yang terdiri dari : Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Adapun untuk mencapai indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator komposit program tahun 2025-2026 meliputi : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak dan urusan tambahan yakni Pemberdayaan Masyarakat adalah : program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Indikator kinerja ini berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yakni menurunnya persentase penduduk miskin.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2025-2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2025-2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan (RPD) Kota Probolinggo tahun 2025-2026 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu sebelumnya telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan ditengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan.

Menyongsong periode dua tahun ke depan (2025-2026) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo termasuk pemangku kepentingannya. Melalui rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025-2026, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan dan sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk keadilan dan kesetaraan gender serta menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, keadilan dan kesetaraan

gender dan perlindungan anak sampai saat ini, kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2025-2026.

Probolinggo, Desember 2023
**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001



**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**